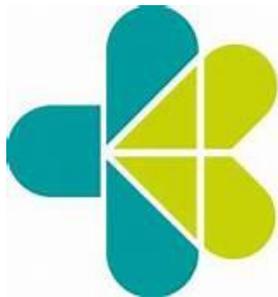


RENCANA AKSI KEGIATAN 2020-2024 KKP KELAS II PALEMBANG



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum	2
C. Potensi dan Permasalahan	9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
A. Visi dan Misi	12
B. Tujuan	12
C. Sasaran Strategis.....	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI	
A. Arah Kebijakan.....	14
B. Strategi	14
C. Kerangka Regulasi.....	14
BAB IV TARGET KINERJA DAN KEGIATAN	
A. Target Kinerja.....	17
B. Kegiatan	18
C. Kerangka Pendanaan	23
BAB V PENUTUP	
Penutup	25
LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jenis Jabatan Fungsional KKP Palembang Tahun 2020	3
1.2 Jenis Jabatan Pelaksana KKP Palembang Tahun 2020.....	4
1.2 Jenis Jabatan Pelaksana KKP Palembang Tahun 2020.....	4
4.1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang 2020-2024.....	17
4.2 Kerangka Pendanaan	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020 ..4	
1.2 Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020.....5	
1.3 Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020.....5	
1.4 Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Golongan Tahun 2020.....6	
1.5 Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang.....7	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Penanggungjawab Kegiatan.....	26
2. Matriks Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024.....	27

KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi Subbagian dan seksi dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 31 Agustus 2020

Kepala,
KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid.
NIP. 197410252005011003

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan

Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. Kondisi Umum

1) Gambaran Umum

Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang pada tahun 2019 telah berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Direktorat Jenderal P2P untuk melakukan Penyelenggaraan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di pintu masuk negara. Secara umum seluruh pelaksanaan kegiatan tahun 2019 mencapai persentase rata-rata 132,21%, 4 (empat) dari 12 (dua belas) indikator kinerja pada tahun 2019 sudah tercapai sesuai target yang ada pada perjanjian kinerja, 6 (enam) dari 12 (dua belas) indikator tercapai melebihi target yang ada pada perjanjian kinerja, 2 (dua) indikator belum memenuhi target yaitu jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan (93,45%) karena adanya peraturan pemerintah yang mengizinkan pelayanan vaksinasi serta penerbitan ICV di klinik/rumah sakit yang memenuhi standar yang ditetapkan, 1 indikator kinerja lainnya adalah jumlah pengadaan sarana prasarana (97,56%) karena adanya wanprestasi penyedia jasa pada pengadaan 1 unit genset.

Di masa mendatang diharapkan meningkatnya kerjasama lintas sektoral dan membangun jejaring kerja yang lebih baik dan lebih solid dengan instansi yang terkait serta meningkatnya komitmen bersama, bersinergi yang kuat antar segenap pegawai dalam meningkatkan kinerja dan performa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang.

2) Sumber Daya Manusia

Pegawai KKP Kelas II Palembang per tanggal 31 Mei 2020 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang termasuk di wilayah kerja, yang terdiri dari 1 (satu) orang jabatan administrator, 4 (empat) Orang Jabatan Pengawas, 32 (tiga puluh dua) orang Jabatan Fungsional (JF), dan 41 (empat puluh satu) orang Jabatan Pelaksana (JP).

Adapun yang menjadi pejabat struktural saat ini adalah:

1. Kepala Kantor : dr. Nur Purwoko Widodo, M. Epid
2. Kepala Sub Bagian TU : Rahmadi Sularso, S.Kom, M.Kes.
3. Kepala Seksi PKSE : dr. Fenty Wardha, M.Kes.
4. Kepala Seksi UKLW : dr. Amelia, M.Kes.
5. Kepala Seksi PRL : dr. Artineke, M.Kes.

32 (tiga puluh dua) orang pegawai Jabatan Fungsional (JF), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Jenis Jabatan Fungsional KKP Palembang Tahun 2020

No	Jenis Fungsional	Jumlah
1.	Analisis kepegawaian terampil	1 Orang
2.	Asisten apoteker penyelia	1 Orang
3.	Asisten apoteker terampil	1 Orang
4.	Dokter ahli madya	3 Orang
5.	Dokter ahli muda	2 Orang
6.	Entomolog kesehatan ahli muda	2 Orang
7.	Entomolog kesehatan ahli pertama	3 Orang
8.	Entomolog kesehatan mahir	1 Orang
9.	Epidemiolog kesehatan ahli muda	3 Orang
10.	Epidemiolog kesehatan ahli pertama	6 Orang
11.	Perawat pertama	1 Orang
12.	Perawat mahir	1 Orang
13.	Perawat penyelia	2 Orang
14.	Perawat terampil	1 Orang
15.	Pranata laboratorium kesehatan ahli muda	1 Orang
16.	Pranata laboratorium kesehatan mahir	1 Orang
17.	Pranata laboratorium kesehatan terampil	1 Orang
18.	Sanitarian terampil	1 Orang

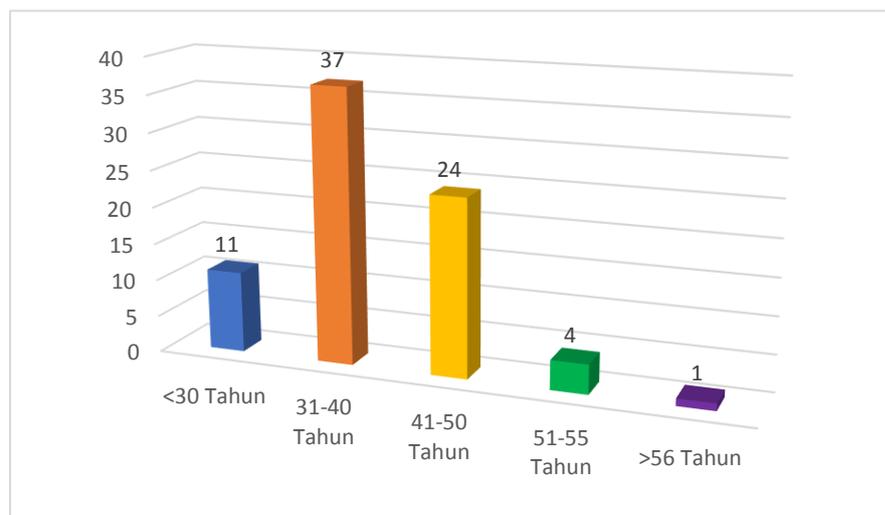
41 (empat puluh satu) orang jabatan pelaksana, terdiri dari:

Tabel 1.2. Jenis Jabatan Pelaksana KKP Palembang Tahun 2020

No	Jenis Jabatan Pelaksana	Jumlah
1.	Analisis keuangan	3 Orang
2.	Asisten apoteker / pengelola kefarmasian	1 Orang
3.	Bendahara	3 Orang
4.	Dokter	4 Orang
5.	Entomolog kesehatan / pengelola P2B2	1 Orang
6.	Entomolog kesehatan ahli	1 Orang
7.	Epidemiolog kesehatan ahli	5 Orang
8.	Epidemiolog kesehatan	1 Orang
9.	Perawat / pengelola keperawatan	9 Orang
10.	Perencana	5 Orang
11.	Sanitarian ahli	5 Orang
12.	Sanitarian	3 Orang

Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan kelompok umur pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa kelompok umur terbanyak diisi antara usia 31-40 tahun sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang atau sebesar 48,05%.

Gambar 1.1. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020



Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan jenis kelamin pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak

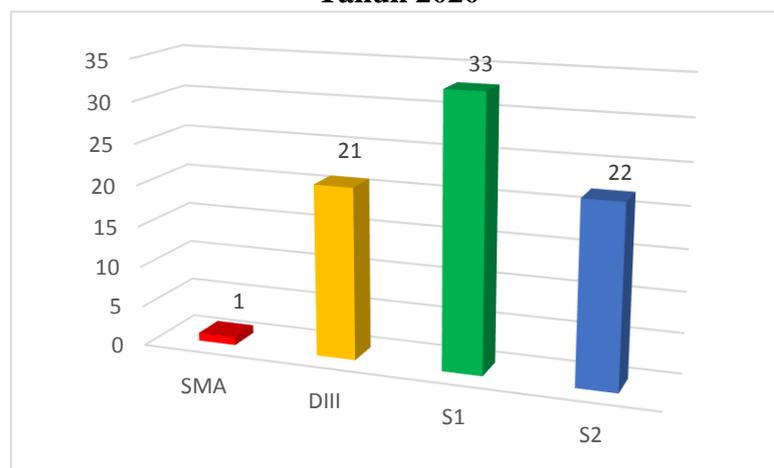
diisi oleh pegawai wanita sejumlah 44 (empat puluh empat) orang atau sebesar 56,5%.

Gambar 1.2. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020



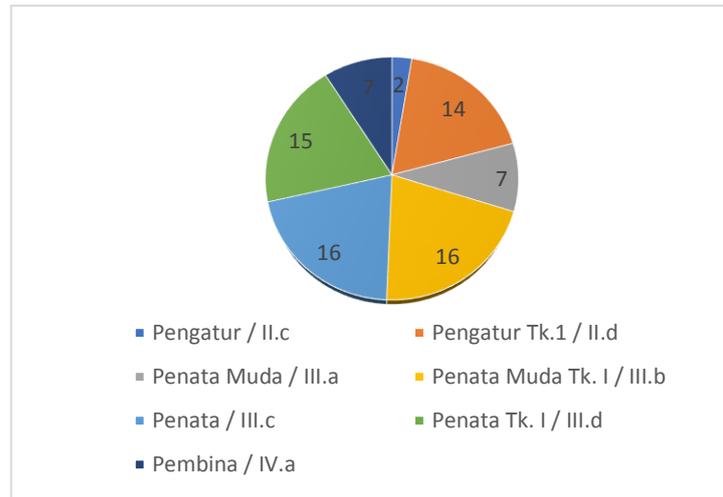
Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan pendidikan pada Grafik 1.4 dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai berpendidikan S1 sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang atau sebesar 42,85%, sedangkan tingkat pendidikan pegawai paling rendah, yaitu SMA sederajat 1 (satu) orang pegawai sebesar 1,29%.

Gambar 1.3. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020



Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan golongan pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai golongan III sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang atau sebesar 69,7%.

Gambar 1.4. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Golongan Tahun 2020



3) Struktur Organisasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2348/Menkes/PER/IV/2011 sebagai perubahan atas Permenkes Nomor: 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, dicantumkan bahwa Struktur Organisasinya terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan;
4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah.

Disamping itu dilengkapi dengan Instalasi, Koordinator Wilker, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 1.5. Struktur Organisasi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang**



a) Subbagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dalam struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang mempunyai tugas menyusun laporan, pengelolaan, informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah:

1. Menyusun rancangan usulan anggaran dan program/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
2. Menyusun rancangan Standar Prosedur Operasional/Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang;
3. Menyusun rancangan rencana pelaksanaan operasional program/kegiatan Bagian Tata Usaha;
4. Mengkoordinir urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang;
5. Menyusun rancangan rencana pengelolaan keuangan/anggaran Bagian Tata Usaha;
6. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang;

7. Menyusun rancangan usulan pengadaan, pemeliharaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang;
8. Menyusun rancangan usulan kebutuhan sumber daya manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang;
9. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/ kegiatan subbagian di lingkungan Bagian Tata Usaha;
10. Menyusun laporan berkala dan tahunan Bagian Tata Usaha;
11. Menyusun informasi hasil pelaksanaan program/kegiatan Bagian Tata Usaha;
12. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan ke dalam DP3;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA), jejaring kerja, dan kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

c) Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

d) Seksi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah

Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

C. Potensi dan Permasalahan

Perubahan gaya hidup dan peningkatan faktor resiko merupakan tantangan dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Oleh karena itu pengendalian penyakit memerlukan pendekatan yang komprehensif, antara lain dengan melaksanakan skrining faktor resiko, KIE, surveillance epidemiologi, pengembangan jejaring kerja, pengendalian faktor resiko berbasis masyarakat dan kegiatan pengendalian lainnya termasuk penanganan kasus sesuai standar.

Beberapa hal yang mendukung antara lain penerapan penganggaran berbasis kinerja dan progres pembinaan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan mulai meningkat. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat, KKP tidak menjadi urusan pemerintah daerah sehingga tidak berpengaruh terhadap gejolak politik di daerah. Kedudukan dan perannya di daerah adalah sebagai institusi perwakilan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan prinsip-prinsip kesetaraan, koordinasi horizontal, dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Adapun ancaman yang dihadapi adalah era globalisasi yang menyebabkan lalu lintas barang, jasa dan manusia semakin sulit untuk diawasi. Desentralisasi pemerintah menyebabkan terjadinya egoisme kedaerahan di wilayah kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular lainnya. Jejaring kerja

dengan pemerintah daerah juga belum optimal sehingga berpengaruh terhadap lemahnya sistem deteksi, respon, dan pelaporan terhadap masalah-masalah kedaruratan kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota yang secara epidemiologis masalah tersebut berpotensi meresahkan dunia internasional.

Pencapaian kinerja tahun 2019, ada 2 indikator yang tidak mencapai target yaitu jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan 93,45% dan jumlah pengadaan sarana prasarana 97,56%. Kegagalan pencapaian target indikator pertama disebabkan karena penerbitan sertifikat dilakukan berdasarkan permintaan/permohonan yang diterima serta adanya peraturan pemerintah yang mengizinkan klinik/ rumah sakit yang memenuhi standar untuk melaksanakan vaksinasi serta penerbitan ICV menyebabkan berkurangnya jumlah masyarakat yang melaksanakan vaksinasi di KKP kelas II Palembang berimbas pada menurunnya jumlah penerbitan ICV. Namun upaya-upaya telah dilaksanakan dalam mencapai target jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan, tetap melaksanakan pelayanan penerbitan sertifikat dengan maksimal serta meningkatkan pelayanan prima ditunjang dengan perbaikan ruang tunggu dan sistem pelayanan.

Pada indikator kedua, kegagalan disebabkan oleh beberapa barang yang akan dibeli ada yang belum terbit di e-Katalog LKPP hingga bulan Juni; belum memiliki SDM yang berpengalaman Lelang di LPSE, baik dalam persiapan pembuatan dokumen maupun pelaksanaan lelangnya; pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia tidak sesuai jadwal; dan terdapat penyedia wanprestasi pada pengadaan genset listrik. Namun upaya-upaya telah dilaksanakan dalam mencapai target, diantaranya menyusun rencana untuk pelaksanaan pengadaan alternative, seperti lelang umum dan lelang cepat; melakukan konsultasi ke pusat dan sharing pengalaman dari teman-teman di Kantor Kesehatan Pelabuhan lainnya; memberikan surat peringatan atau sanksi kepada penyedia yang melakukan pekerjaan tidak sesuai jadwal; dan memberikan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan pengajuan ke daftar hitam.

Pada tahun 2020 ini, seperti kita ketahui bahwa terdapat pandemi covid-19 yang mengancam seluruh dunia. Dengan adanya pandemi ini, mengubah pola hidup masyarakat. Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai unit kerja yang bertugas menjaga

pintu masuk negara ikut berperan dalam cegah tanggal masuknya virus Covid-19 melalui skrining penumpang, kru pesawat dan Anak Buah Kapal (ABK).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Memiliki tujuan strategis Meningkatnya Pelayanan Kekearifinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.

C. Sasaran Strategis

Dalam mencapai tujuan strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan ditetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P serta Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi ditetapkan arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiki
2. Penguatan akuntabilatas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

B. Strategi

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
7. Kerjasama lintas sektor dan program

C. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan

dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain:

- 1) SOP Kegiatan Keekarantinaan
- 2) SOP Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan
- 3) SOP Kegiatan Upaya Kesehatan Pelabuhan Dan Lintas Wilayah
- 4) SOP Pengendalian Gratifikasi
- 5) SOP Pelaporan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 6) SOP Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*)
- 7) SOP Pelaporan Bulanan
- 8) SOP Pengamanan Asset
- 9) SOP Mekanisme Penyetoran PNBK
- 10) SOP Operasional Klinik pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 11) SOP Operasional Laboratorium pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 12) SOP Logistik pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 13) SOP Pemeriksaan Akhir pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 14) SOP Pengelolaan Sarana pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 15) SOP Pengendalian Arsip pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 16) SOP Pengendalian Dokumen pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 17) SOP Pengendalian Risiko Lingkungan pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 18) SOP Surveilans Epidemiologi pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 19) SOP Siskohat pada Kegiatan Embarkasi Haji

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain:

- 1) SOP Pemeriksaan Sanitasi Pesawat
- 2) SOP Pemeriksaan Kesehatan Kapal

- 3) SOP Pemeriksaan Barang
- 4) SOP Penyampaian Laporan Keuangan
- 5) SOP Penilaian Kinerja Anggaran
- 6) SOP Implementasi WBK

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun 2020-2024.

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel 4.1

**Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun 2020-2024**

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Pelayanan Kekearifantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifantinaan kesehatan	2.347.506	2.463.942	2.586.316	2.714.816	2.840.726
			2. Persentase faktor resiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut,	90%	90%	95%	95%	100%

			barang dan lingkungan					
			3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	85%	85%	85%	85%
			4. Nilai kinerja anggaran	80%	85%	90%	95%	100%
			5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	85%	90%	95%	100%
			6. Kinerja implementasi WBK satker	70%	75%	80%	85%	90%
			7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	47,5%	50%	52,5%	55%

B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Adalah Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC

- 2) Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)
 - 3) Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan penyeberangan
 - 4) Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara
 - 5) Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC(Port Health Quarantine Clearance)
 - 6) Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut
 - 7) Layanan Pemeriksaan P3K Kapal
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
- Kegiatan yang dilakukan:
- 1) Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Air Minum
 - 2) Pengawasan Sarana Pengolahan Air Bersih dan Kualitas Air Bersih
 - 3) Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan Dalam Kota
 - 4) Pengawasan Sampah dan Limbah Cair
 - 5) Pengawasan TPM dan Kualitas Makanan
 - 6) Inspeksi Sanitasi Tempat-Tempat Umum
 - 7) Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan di Wilker
 - 8) Workshop Pengelolaan Kualitas Lingkungan di Pelabuhan
 - 9) Workshop Penjamah Makanan
 - 10) Workshop Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan
 - 11) Uji Resistensi Insektisida di Wilayah Kerja
 - 12) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor
 - 13) Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Respon Cepat
 - 14) Penyelidikan Epidemiologi
 - 15) Verifikasi Rumor
 - 16) Penyusunan Dokumen Kontijensi di Bandara Silampari Lubuk Linggau
 - 17) Refreshing Tim TGC
 - 18) Pelaksanaan Deteksi Dini HIV / AIDS di Wilayah Kerja
 - 19) Pemeriksaan Deteksi Dini TBC di Wilker

- 20) Pengawasan Faktor Resiko Kesehatan Bagi Pelaku Perjalanan di Wilayah Kerja
 - 21) Pelaksanaan Jejaring Kerja Surveilans Epidemiologi Lintas Sektor Melalui Surveilans Aktif Dalam Rangka Pengamatan Epidemiologi
 - 22) Pengadaan Buletin Karantina Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara dan PLBDN
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
- Kegiatan yang dilakukan:
- 1) Pembentukan Forum Pelabuhan/Bandara Sehat
 - 2) Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Embarkasi LS/LP
 - 3) Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi Dalam Kota
 - 4) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan
 - 5) Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi Dalam Kota
 - 6) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi Debarkasi Haji
 - 7) Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan - Pra Embarkasi
 - 8) Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan - Lebaran / Nataru
 - 9) Surveilans dan Pengendalian Vektor dan BPP - Pra Embarkasi
 - 10) Surveilans dan Pengendalian Vektor dan BPP - Lebaran / Nataru
 - 11) Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus
 - 12) Layanan pengendalian vektor DBD
 - 13) Layanan Survei Vektor PES
 - 14) Layanan Pengendalian Vektor Diare
 - 15) Layanan Survei Vektor DBD
 - 16) Layanan Survei Vektor Malaria
 - 17) Layanan Survei Vektor Diare
 - 18) Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS
 - 19) Layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja KKP

4. Nilai kinerja anggaran

Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Penyusunan e-Planning
- 2) Penyusunan Dokumen RKAKL
- 3) Pembahasan dan Penelahaan Usulan Dokumen Perencanaan dan Revisi Anggaran
- 4) Penyusunan Laporan e-Monev Penganggaran
- 5) Penyusunan Laporan e-Monev Bappenas / PP 39 Tahun 2006

5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan

Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Penyusunan Realisasi Anggaran Triwulan/Semester/Tahunan
- 2) Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E1
- 3) Rekonsiliasi Pengelolaan PNBPNBP
- 4) Konsultasi Permasalahan Pengelolaan/Pelaporan PNBPNBP ke Pusat
- 5) Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

6. Kinerja implementasi

Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Fasilitas Perkantoran
- 2) Bahan Pelayanan Kekeantinaan Kesehatan
- 3) Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Pelayanan dan Pendukung Kekeantinaan Kesehatan
- 4) Penyusunan Revisi RAK 2020 – 2024
- 5) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program
- 6) Penyusunan Laporan Tahunan Satker
- 7) Penyusunan Laporan Indikator RAK
- 8) Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja
- 9) Evaluasi SAKIP (Undangan Pusat)
- 10) Penyusunan Profil

- 11) Sosialisasi Peraturan dan Koordinasi Pengelolaan PNBP Pada Pihak Internal dan Eksternal UPT
- 12) Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai
- 13) Layanan Mutasi Kepegawaian
- 14) Pemeriksaan Kesehatan ASN
- 15) Bimbingan Teknis Ke Wilayah Kerja
- 16) Rapat Pertemuan Koordinasi LS/LP
- 17) Konsultasi Teknis ke Pusat
- 18) Konsultasi Terkait Inventarisasi Dumas
- 19) Pengelolaan UPG
- 20) Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS
- 21) Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif
- 22) Pengelolaan Kantor Berhias
- 23) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
- 24) Pembuatan Media KIE
- 25) Penyusunan ABK
- 26) Penyusunan Peta dan Informasi Jabatan
- 27) Penyusunan dan Monev SOP AP
- 28) Rapat Persiapan Penilaian WBK
- 29) Reviu Data Kualifikasi
- 30) Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN
- 31) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- 32) Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
- 33) Pengadaan Pakaian Kerja Supir /Pesuruh /Perawat /Dokter /Satpam /Tenaga Teknis Lainnya
- 34) Pemeliharaan Gedung dan Kantor
- 35) Pemeliharaan Rumah Negara
- 36) Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor
- 37) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/8
- 38) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- 39) Langgan Daya dan Jasa
- 40) Sewa Gedung Kantor Wilker Tanjung Api-Api

- 41) Operasional Perkantoran
 - 42) Tenaga Honorer
 - 43) Pelaksana Pengelola Satker
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
- Kegiatan yang dilakukan:
- 1) Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Peningkatan Kapasitas SDM Sanitarian/Entomolog
 - 3) Pelatihan Pengendalian Vektor dan BPP
 - 4) Pelatihan Pengawasan Tempat Pengolahan Pangan dan Tempat-Tempat Umum
 - 5) Peningkatan Kualitas SDM Surveilans Epidemiologi
 - 6) Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (,000)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
KKP Kelas II Palembang											
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	2.347.506	2.463.942	2.586.316	2.714.816	2.840.726	271.800	285.390	299.660	314.644	330.376
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	90%	95%	95%	100%	1.181.407	1.240.480	1.302.503	1.367.627	1.436.009
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	85%	85%	85%	85%	1.420.474	1.491.499	1.566.074	1.644.381	1.726.601
4	Nilai kinerja anggaran	80%	85%	90%	95%	100%	108.108	113.514	119.190	125.150	131.408
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	85%	90%	95%	100%	109.290.000	114.755	120.492	126.516	132.842
6	Kinerja implementasi WBK satker	70%	75%	80%	85%	90%	13.800.784	14.490.824	15.215.368	15.976.133	16.774.941
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	47,5%	50%	52,5%	55%	108.964	130.757	156.909	188.290	225.947

BAB V

P E N U T U P

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang/ seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode lima tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang, oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan	Kepala Seksi PKSE Kepala Seksi PRL Kepala Seksi UKLW
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Kepala Seksi PKSE Kepala Seksi PRL
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Kepala Seksi PKSE Kepala Seksi PRL
		4	Nilai kinerja anggaran	Kepala subbagian Tata Usaha
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Kepala subbagian Tata Usaha
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Kepala subbagian Tata Usaha
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Kepala subbagian Tata Usaha

**MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN
TAHUN 2020 – 2024**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Jumlah Pemeriksaan Penafisan Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan Yang Dilakukan	Jumlah Kumulatif pada kegiatan penafisan orang, alat angkut, barang, serta pemeriksaan TTU dan TPM	2.347.506	2.463.942	2.586.316	2.714.816	2.840.726
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor Risiko Yang Dikendalikan Berdasarkan Temuan Pada Indikator No. 1	Dihitung berdasarkan tren tertinggi dalam 3 tahun terakhir	90%	90%	95%	95%	100%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Pengendalian faktor risiko lingkungan di wilayah kerja KKP Palembang	Berdasarkan indeks: < 50 : Risiko Tinggi 50 -80 : Risiko sedang > 80 : Risiko Rendah	85%	85%	85%	85%	85%
4	Nilai kinerja anggaran	Laporan Kinerja pada E Monev DJA	Perbandingan realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan	80%	85%	90%	95%	100%
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Kepatuhan dalam menyampaikan laporan pada aplikasi ON SPAN	Perbandingan laporan yang disampaikan dengan target laporan yang dikirimkan tepat waktu	80%	85%	90%	95%	100%
6	Kinerja implementasi WBK satker	Penilaian kinerja WBK KKP Kelas II Palembang	Dinilai dari Self Assesment	70%	75%	80%	85%	90%
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	ASN Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Sebanyak 20 JPL Dalam Kurun Waktu 1 (Satu) Tahun	Jumlah kumulatif pegawai yang mengikuti pelatihan selama 1 (satu) tahun anggaran	45%	47,5%	50%	52,5%	55%